



**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GHULLAM HAMDU  
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI PGSD PROGRAM SARJANA  
3. NHK : 971752

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 820.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/141 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 53.500.000

- MOBIL, ISUZU TBR 54 PRLC / MINI BUS Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
- MOTOR, HONDA SMTR SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, YAMAHA SMTR SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 297.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 25.000.000

**Sub Total** Rp. 1.204.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.204.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.